

**ANALISIS KEBIJAKAN DAN DINAMIKA KERJASAMA KAWASAN
EKONOMI BIRU INDONESIA
DALAM KERANGKA KERJA ASEAN**

SorayaAyumara⁽¹⁾ Amirmukadar⁽²⁾
⁽¹⁾⁽²⁾Universitas Muhammadiyah Bengkulu
sorayaayumaraaa@gmail.com

Abstract

The blue economy has become a strategic agenda for ASEAN countries in an effort to achieve sustainable economic growth based on the management of marine resources. Indonesia, as the world's largest archipelagic country with the second longest coastline globally, has a central role in encouraging the implementation of the ASEAN *Blue Economy Framework*. This article analyzes Indonesia's blue economy policy in the context of ASEAN regional cooperation, identifies the dynamics of the implementation of the regional framework, and examines the challenges and opportunities faced. Through the method of document analysis and literature on national and regional policies, this study finds that Indonesia has played a proactive role as the driving force of the ASEAN blue economy through the launch of the Indonesia *Blue Economy Roadmap 2023-2045* which is a reference for other ASEAN countries. However, implementation at the national and regional levels still faces a variety of structural barriers, including capacity gaps between countries, funding limitations, and the need for harmonization of cross-border regulations. This article provides recommendations to strengthen national-regional policy synergies, enhance innovative financing mechanisms such as blue carbon finance, and strengthen the role of coastal communities in decision-making.

Keywords: blue economy, ASEAN, Indonesia, maritime policy, regional cooperation, sustainable development

PENDAHULUAN

Kawasan Asia Tenggara memiliki potensi kelautan yang sangat besar dengan garis pantai sepanjang lebih dari 173.000 kilometer dan luas wilayah laut mencapai 9 juta kilometer persegi (ASEAN, 2023). Sumber daya kelautan di kawasan ASEAN mencakup perikanan tangkap dan budidaya, pariwisata bahari, transportasi maritim, energi terbarukan berbasis laut, serta jasa ekosistem seperti penyerapan karbon oleh mangrove dan padang lamun. Namun, potensi ekonomi kelautan ini belum dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Tekanan terhadap ekosistem laut semakin meningkat akibat *overfishing*, polusi plastik, degradasi habitat pesisir, serta dampak perubahan iklim yang mengancam ketahanan pangan dan kehidupan masyarakat pesisir (Mongabay Indonesia, 2024).

Dalam konteks tersebut, konsep ekonomi biru (*blue economy*) muncul sebagai paradigma pembangunan yang berupaya mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi

dengan keberlanjutan ekologi dan keadilan sosial. Ekonomi biru didefinisikan sebagai pemanfaatan berkelanjutan dari sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian dan lapangan kerja, serta kesehatan ekosistem laut (World Bank, 2017). Konsep ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 14 tentang kehidupan di bawah laut dan SDG 8 tentang pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pada September 2023, negara-negara ASEAN secara resmi mengadopsi *ASEAN Blue Economy Framework* (Kerangka Ekonomi Biru ASEAN) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 di Jakarta (Centre for International Law, 2023). Kerangka kerja ini menjadi panduan strategis bagi negara-negara anggota dalam mengembangkan ekonomi biru secara terkoordinasi dan berkelanjutan. *ASEAN Blue Economy Framework* dibangun atas tiga pilar utama: (1) *Blue Conservation* konservasi dan pemulihan ekosistem laut, (2) *Blue Science and Technology* pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, dan (3) *Value Creation* penciptaan nilai ekonomi dari sektor kelautan yang berkelanjutan (Atlantis Press, 2024; Thailand Ministry of Foreign Affairs, 2023).

Indonesia memiliki posisi strategis dan kepentingan vital dalam implementasi ekonomi biru di kawasan ASEAN. Sebagai negara kepulauan terbesar dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang 99.093 kilometer, Indonesia memiliki potensi ekonomi kelautan yang sangat besar dan beragam (Hukum Online, 2025). Sektor kelautan dan perikanan Indonesia berkontribusi sekitar 7,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan target meningkat menjadi 15 persen pada tahun 2045 (Antara News, 2024). Lebih dari 60 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir dan bergantung pada sumber daya laut untuk penghidupan mereka (Bappenas, 2024).

Mengakui pentingnya ekonomi biru bagi pembangunan nasional, pemerintah Indonesia meluncurkan *Indonesia Blue Economy Roadmap* pada Juli 2023, bertepatan dengan *ASEAN Blue Economy Forum* di Belitung (Arise Plus Indonesia, 2023). Roadmap ini menjadi dokumen kebijakan komprehensif pertama di kawasan ASEAN yang mengintegrasikan berbagai sektor kelautan dalam satu kerangka strategis jangka panjang. Indonesia kemudian menjadi rujukan dan motor penggerak bagi negara-negara ASEAN lainnya dalam mengimplementasikan ekonomi biru (Bappenas, 2024).

Konsep Ekonomi Biru

Istilah "ekonomi biru" (*blue economy*) pertama kali dipopulerkan oleh Gunter Pauli dalam bukunya *The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs* (2010), yang mengusulkan model bisnis berkelanjutan yang terinspirasi dari ekosistem alam (Pauli, 2010). Namun, dalam konteks kelautan, definisi ekonomi biru lebih mengacu pada konsep yang dikembangkan oleh Bank Dunia dan Uni Eropa, yaitu "pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian, dan kesehatan ekosistem laut" (European Commission, 2021).

Ekonomi biru membedakan dirinya dari ekonomi maritim konvensional melalui penekanan pada tiga dimensi yang harus dipenuhi secara simultan:

- **Dimensi Ekonomi:** Menciptakan nilai tambah ekonomi, lapangan kerja, dan pendapatan dari sektor kelautan
- **Dimensi Ekologi:** Memastikan keberlanjutan ekosistem laut dan menghindari degradasi lingkungan

- Dimensi Sosial: Memastikan keadilan distributif, inklusif sosial, dan pemberdayaan masyarakat pesisir

Sektor-sektor yang termasuk dalam ekonomi biru sangat beragam, meliputi perikanan tangkap dan budidaya, pariwisata bahari, transportasi dan pelabuhan maritim, energi terbarukan laut (*offshore wind, wave energy, tidal energy*), bioteknologi kelautan, pertambangan laut dalam, serta jasa ekosistem seperti *blue carbon* (karbon biru) yang diserap oleh mangrove, padang lamun, dan rawa garam (ERIA, 2023).

Kerangka Kerja Sama Regional ASEAN

ASEAN sebagai organisasi regional memiliki beberapa mekanisme kerja sama yang relevan dengan ekonomi biru, termasuk *ASEAN Economic Community* (AEC), *ASEAN Socio Cultural Community* (ASCC), dan berbagai kerjasama sektoral di bidang perikanan, lingkungan, dan pariwisata (ASEAN, 2015). Namun, sebelum adopsi *ASEAN Blue Economy Framework* pada 2023, belum ada kerangka kerja terpadu yang secara khusus mengintegrasikan seluruh aspek ekonomi kelautan dalam perspektif pembangunan berkelanjutan.

ASEAN Blue Economy Framework dikembangkan melalui proses konsultatif yang melibatkan negara-negara anggota, mitra pembangunan seperti UNDP, Bank Dunia, dan *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia* (ERIA), serta organisasi masyarakat sipil (UNDP Indonesia, 2024). Kerangka ini bertujuan untuk:

1. Memberikan visi dan arah strategis bersama untuk pengembangan ekonomi biru di ASEAN
2. Memperkuat koordinasi dan harmonisasi kebijakan antar negara anggota
3. Mendorong investasi dan inovasi dalam sektor ekonomi biru berkelanjutan
4. Meningkatkan kapasitas dan berbagai pengetahuan antar negara
5. Memastikan inklusif sosial dan pemberdayaan masyarakat pesisir

Framework ini mengidentifikasi tiga "*Blue Strategies*" utama: *Blue Conservation*, *Blue Science & Technology*, dan *Value Creation*; serta lima "*Blue Enablers*" yang mendukung implementasi: *governance* dan kebijakan, pembiayaan dan investasi, kapasitas dan pengetahuan, teknologi dan inovasi, serta kemitraan dan kerja sama (ASEAN, 2023).

Governance Regional dan Implementasi Kebijakan

Dalam konteks *governance* regional, implementasi kebijakan ASEAN menghadapi tantangan unik yang berbeda dari organisasi supranasional seperti Uni Eropa. ASEAN beroperasi berdasarkan prinsip konsensus, non-interferensi, dan kedaulatan nasional yang kuat (Acharya, 2014). Hal ini berarti bahwa kerangka kerja ASEAN bersifat *non-binding* dan bergantung pada komitmen sukarela negara-negara anggota untuk implementasi di tingkat nasional.

Teori *regionalism* dalam hubungan internasional menjelaskan bahwa kerjasama regional yang efektif memerlukan beberapa kondisi: (1) kesamaan kepentingan strategis, (2) kepercayaan dan norma bersama, (3) mekanisme koordinasi yang efektif, dan (4) kapasitas implementasi di tingkat nasional (Hurrell, 1995). Dalam konteks ekonomi biru ASEAN, analisis terhadap keempat kondisi ini penting untuk memahami dinamika dan tantangan implementasi.

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen (*document analysis*) dan studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis kebijakan yang tertuang dalam dokumen-dokumen resmi pemerintah, organisasi regional, dan publikasi akademik (Bowen, 2020).

Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri dari:

1. Dokumen kebijakan resmi: *ASEAN Blue Economy Framework* (2023), *Indonesia Blue Economy Roadmap* (2023), dokumen KTT ASEAN, siaran pers pemerintah Indonesia dan sekretariat ASEAN
2. Publikasi lembaga penelitian: Laporan ERIA tentang ekonomi biru di Asia Tenggara, publikasi UNDP Indonesia, dokumen Bank Dunia
3. Jurnal akademik: Artikel ilmiah *peer-reviewed* tentang ekonomi biru, *governance* regional ASEAN, dan kebijakan maritim Indonesia
4. *Policy brief* dan *working paper*: Publikasi dari *think tank* dan lembaga advokasi kebijakan seperti *Transparency International* Indonesia, Bappenas, dan organisasi internasional lainnya

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Inventarisasi dokumen: Mengumpulkan dan mengklasifikasikan dokumen-dokumen relevan berdasarkan kategori (kebijakan nasional, kerangka regional, publikasi akademik)
2. Content analysis: Menganalisis isi dokumen untuk mengidentifikasi tema-tema utama, prioritas kebijakan, mekanisme implementasi, dan indikator keberhasilan
3. Comparative analysis: Membandingkan kebijakan Indonesia dengan kerangka ASEAN serta praktik negara-negara ASEAN lainnya
4. Gap analysis: Mengidentifikasi kesenjangan antara komitmen kebijakan dengan implementasi di lapangan
5. Triangulasi: Memverifikasi temuan melalui berbagai sumber data untuk memastikan validitas analisis

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Kebijakan Ekonomi Biru Indonesia

Indonesia Blue Economy Roadmap 2023-2045

Indonesia Blue Economy Roadmap yang diluncurkan pada Juli 2023 merupakan dokumen strategis komprehensif yang menjadi panduan pengembangan ekonomi biru Indonesia hingga tahun 2045 (Bappenas, 2023). Roadmap ini disusun oleh Bappenas bersama dengan 27 kementerian dan lembaga terkait melalui proses konsultasi yang melibatkan akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil (FKP Indonesia & Bappenas, 2025).

Visi yang ditetapkan dalam roadmap adalah: "Menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi biru global yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing tinggi pada tahun 2045" (Bappenas, 2023). Untuk mencapai visi tersebut, roadmap menetapkan beberapa target ambisius:

- Meningkatkan kontribusi sektor kelautan terhadap PDB dari 7,6 persen (2022) menjadi 15 persen pada 2045
- Menciptakan 15 juta lapangan kerja baru di sektor kelautan pada 2045
- Mengurangi emisi karbon dari sektor kelautan sebesar 30 persen pada 2030
- Merestorasi 600.000 hektare ekosistem pesisir pada 2030
- Meningkatkan produktivitas perikanan berkelanjutan sebesar 50 persen pada 2035

Roadmap ini dibagi dalam tiga fase implementasi:

Fase	Periode	Fokus Utama
1	2023-2030	Penguatan fondasi: perbaikan <i>governance</i> , pengembangan data dan sistem monitoring, peningkatan kapasitas SDM, dan penegakan hukum di laut
2	2031-2038	Akselerasi pertumbuhan: peningkatan investasi sektor biru, adopsi teknologi, pengembangan industri nilai tambah, dan ekspansi pasar ekspor
3	2039-2045	Konsolidasi dan transformasi: menjadikan Indonesia sebagai leader ekonomi biru global, integrasi penuh <i>sustainability principles</i> , dan pencapaian target PDB 15 persen

Table 1: Fase Implementasi Indonesia Blue Economy Roadmap

Sektor Prioritas Ekonomi Biru Indonesia

Roadmap mengidentifikasi delapan sektor prioritas ekonomi biru yang akan dikembangkan secara terintegrasi (Bappenas, 2024):

1. Perikanan Tangkap Berkelanjutan: Menerapkan prinsip-prinsip *Maximum Sustainable Yield* (MSY), memperkuat sistem *monitoring, control, and surveillance* (MCS), dan memberantas *illegal, unreported, and unregulated* (IUU) fishing
2. Perikanan Budidaya (Akuakultur): Mengembangkan budidaya laut lepas (*mariculture*), rumput laut, dan ikan bernilai tinggi dengan teknologi ramah lingkungan
3. Pariwisata Bahari Berkelanjutan: Mengembangkan destinasi wisata bahari yang ramah lingkungan, *community-based tourism*, dan *marine ecotourism*
4. Energi Terbarukan Laut: Memanfaatkan energi angin lepas pantai (*offshore wind*), energi gelombang, dan energi pasang surut untuk mendukung target *net zero emission*
5. Bioteknologi Kelautan: Mengembangkan industri biofarmasi, kosmetik, dan pangan fungsional berbasis sumber daya laut
6. Transportasi dan Konektivitas Maritim: Memperkuat sistem logistik maritim, mengembangkan pelabuhan hijau, dan meningkatkan efisiensi transportasi laut
7. *Blue Carbon*: Mengoptimalkan fungsi ekosistem pesisir (mangrove, padang lamun,

rawa garam) sebagai penyerap karbon dan mengembangkan mekanisme pembiayaan karbon biru

8. Industri Maritim Berkelanjutan: Mengembangkan galangan kapal ramah lingkungan, daur ulang kapal, dan industri pendukung maritim lainnya

Instrumen Kebijakan dan Governance

Untuk mendukung implementasi roadmap, pemerintah Indonesia mengembangkan beberapa instrumen kebijakan dan mekanisme *governance* (Kemenko Perekonomian, 2025):

Indonesia Blue Economy Index (IBEI): Sistem indeks komprehensif yang mengukur kinerja ekonomi biru Indonesia berdasarkan 35 indikator yang mencakup dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial. IBEI digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi implementasi roadmap (Bappenas, 2024).

National Task Force on Blue Economy: Gugus tugas lintas kementerian yang dikoordinasikan oleh Bappenas untuk memastikan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan ekonomi biru di tingkat nasional (Kemenko Marves, 2024).

Blue SEAFinance Hub: Platform pembiayaan inovatif yang dikembangkan bersama dengan UNDP dan GEF untuk menghubungkan proyek-proyek ekonomi biru dengan sumber pendanaan dari sektor publik, swasta, dan filantropi (Green Network Indonesia, 2025).

Regulatory Sandbox untuk Ekonomi Biru: Mekanisme percobaan regulasi yang memungkinkan inovasi dalam sektor ekonomi biru dapat diuji coba sebelum diadopsi dalam regulasi formal (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Keterkaitan dengan Kerangka ASEAN

Indonesia Blue Economy Roadmap dirancang dengan mempertimbangkan keselarasan dengan *ASEAN Blue Economy Framework*. Terdapat beberapa area kesesuaian strategis (Bappenas, 2023):

Prinsip dan pendekatan: Baik roadmap Indonesia maupun *framework* ASEAN sama-sama menerapkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial, serta menekankan prinsip keberlanjutan, inklusi, dan inovasi.

Struktur pilar: Delapan sektor prioritas Indonesia dapat dipetakan ke dalam tiga pilar ASEAN (*Blue Conservation, Blue Science & Technology, Value Creation*), menunjukkan konsistensi dalam prioritas sektoral.

Mekanisme implementasi: Indonesia mengadopsi pendekatan *multi-stakeholder* dan *governance* yang partisipatif, sejalan dengan prinsip-prinsip yang diusung dalam *framework* ASEAN.

Namun, roadmap Indonesia juga memiliki beberapa kekhususan yang mencerminkan konteks nasional, seperti penekanan pada kedaulatan maritim, pengembangan pulau-pulau kecil terluar, dan pemberdayaan masyarakat adat pesisir (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2024).

II. Struktur dan Implementasi ASEAN Blue Economy Framework

Proses Penyusunan dan Adopsi Framework

ASEAN Blue Economy Framework disahkan pada KTT ASEAN ke-43 di Jakarta pada September 2023, menandai tonggak penting dalam kerja sama kelautan

regional(ASEAN, 2023).Prosespenyusunan*framework*inidimulaisejak2020melaluiserangkaiankonsultasi regional yang melibatkan berbagai stakeholder.

Beberapamilestonepentingdalamprosespenyusunan *framework*:

- 2020-2021: Kajian awal oleh ERIA tentang potensi dan tantangan ekonomi biru di Asia Tenggara(ERIA, 2023)
- 2022: Serangkaian konsultasi regional dan *national focal point meetings* untuk mengidentifikasi prioritas bersama
- Juli 2023: ASEAN *Blue Economy Forum* di Belitung, Indonesia, sebagai forum konsultasi besar yang membahas *draft framework* dan peluncuran Indonesia *Blue Economy Roadmap*(ERIA, 2023)
- September2023:PengesahanresmiASEAN *BlueEconomyFramework*padaKTT ASEAN ke-43 di Jakarta(Centre for International Law, 2023)

Indonesia memainkan peran kunci dalam proses penyusunan dan pengesahan *framework* ini, baik sebagai tuan rumah KTT ASEAN 2023 maupun melalui kontribusi substantif dalam perumusan konten *framework*(Kementerian Luar Negeri RI, 2023).

Struktur dan Komponen *Framework*

ASEAN *Blue Economy Framework* dibangun atas arsitektur yang terdiri dari prinsip-prinsip panduan (*guiding principles*), strategi biru (*blue strategies*), dan pendukung biru (*blue enablers*)(ASEAN, 2023).

Guiding Principles mencakup enam prinsip utama:

1. *Sustainability*:Memastikankeseimbanganantarapemanfaatanekonomidan kelestarian ekosistem laut
2. *Inclusivity*:Memastikanmanfaatekonomibirudapatdinikmatiolehsemua kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan
3. *Innovation*:Mendorongpengembangandanadopsiteknologisertamodelbisnis inovatif
4. *Resilience*:Membangunketahanan sistemekonomidanekologiterhadap guncangan dan perubahan iklim
5. *Collaboration*:Memperkuatkerjasamaantarnegara,sektor,dan stakeholder
6. *Evidence-based*:Menggunakandatanilmupengetahuansebagai dasar pengambilan keputusan

*Blue Strategi*esterdiridaritigapilarutama(AtlantisPress,2024):

Pilar	Fokus Area
<i>Blue Conservation</i>	Konservasi keanekaragaman hayati laut, restorasi ekosistem pesisir,pengelolaankawasankonservasilaut,penguranganpolusi laut
<i>Blue Science & Technology</i>	Riset dan pengembangan teknologi kelautan, digitalisasi sektor maritim, pengembangan <i>early warning systems</i> , peningkatan kapasitas SDM

<i>Value Creation</i>	Pengembangan sektor ekonomi biru berkelanjutan, peningkatan nilai tambah produk kelautan, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan UMKM maritim
-----------------------	---

Table2:TigaPilarASEANBlueEconomyFramework

Blue Enablers adalah faktor-faktor pendukung yang memfasilitasi implementasi ketiga strategi di atas(ASEAN, 2023):

1. *Governance and Policy*: Harmonisasi regulasi, penegakan hukum, dan kebijakan yang kondusif
2. *Finance and Investment*: Mobilisasi pendanaan publik-swasta, instrumen pembiayaan inovatif, dan investasi berkelanjutan
3. *CapacityandKnowledge*:PeningkatankapasitasinstitusidanSDM,*knowledge sharing*, dan pendidikan maritim
4. *TechnologyandInnovation*:Transferteknologi,inkubasistartupmaritim,dan digital *transformation*
5. *PartnershipandCooperation*:Kerjasamamulti-stakeholder,*public-private partnership*, dan *engagement* dengan mitra eksternal

Mekanisme Implementasi Regional

ASEAN *Blue Economy Framework* menetapkan beberapa mekanisme untuk mendukung implementasi di tingkat regional(Thailand Ministry of Foreign Affairs, 2023): ASEAN *Task Force on Blue Economy*: Dibentuk untuk mengkoordinasikan implementasi *framework*, memfasilitasi dialog antar negara, dan melakukan monitoring & evaluation. *Task force* ini terdiri dari *focal points* dari setiap negara anggota dan bertemu secara berkala(ASEAN, 2024).

ASEAN *Blue Economy Forum*: Forum tahunan yang menjadi platform untuk berbagi *best practices*,membangkunkemitraan,danmendiskusikanisu-isustrategisterkaitekonomibiru. Forum pertama diselenggarakan di Belitung, Indonesia (2023), dan dilanjutkan di Luang Prabang, Laos (2024)(Bappenas, 2024).

Blue Innovation Challenge dan Blue Innovation Expo: Program yang dikembangkan bersamaUNDPuntukmengidentifikasidanmendukunginovasi-inovasidalamekonomi biru, serta menghubungkan *innovators* dengan investor(UNDP Indonesia, 2025; UNDP Indonesia, 2025).

BlueCarbonandFinanceProfilingProject:InisiatifbersamaASEAN,Jepang,danUNDP untuk mengembangkan profil pembiayaan karbon biru di negara-negara ASEAN sebagai dasar untuk mengakses pasar karbon internasional(UNDP Indonesia, 2025; UNDP Indonesia, 2025).

KontribusiIndonesiadalamFramework ASEAN

IndonesiamemilikikontribusisignifikandalampengembangandanimplementasiASEAN *BlueEconomy Framework*melaluibeberapaacara(ArisePlusIndonesia,2023):

Kepemimpinanpolitik:SebagaituanrumahKTTASEAN2023,Indonesiaaktifmendorong pengesahan *framework* dan menempatkan ekonomi biru sebagai salah satu prioritas kepresidenan ASEAN Indonesia(Kementerian Luar Negeri RI, 2023).

Model kebijakan: Indonesia *Blue Economy Roadmap* menjadi referensi pertama di ASEAN yang mengintegrasikan ekonomi biru dalam dokumen perencanaan nasional jangka panjang, memberikan contoh *best practice* bagi negara-negara lain (Arise Plus Indonesia, 2023).

Platform pembiayaan: Indonesia bersama UNDP dan GEF memelopori pengembangan *Blue SEA Finance Hub* yang berbasis di Jakarta dan melayani seluruh kawasan ASEAN (Green Network Indonesia, 2025).

Kapasitas riset: Indonesia melalui berbagai institusi risetnya (BRIN, IPB University, ITS, Unhas) aktif berkontribusi dalam pengembangan *knowledge base* ekonomi biru ASEAN (IPB University, 2025).

Konservasi karbon biru: Indonesia memiliki luas mangrove terbesar di dunia (sekitar 3,5 juta hektar atau 23 persen mangrove global) dan menjadi pioner dalam pengembangan mekanisme *blue carbon finance* di ASEAN (Climate Works Centre, 2025).

III. Dinamika Kerja Sama Kawasan ASEAN

Pola Kerja Sama dan Koordinasi

Implementasi *ASEAN Blue Economy Framework* menghadirkan dinamika kerja sama yang kompleks mengingat keragaman kondisi ekonomi, kapasitas institusional, dan prioritas pembangunan di antara 10 negara anggota ASEAN. Kontribusi sektor kelautan terhadap PDB nasional sangat bervariasi, dari sekitar 1-2 persen di negara-negara *landlocked* seperti Laos, hingga mencapai 20-30 persen di negara-negara kepulauan seperti Filipina dan Indonesia (ERIA, 2023).

Polanya kerja sama dalam ekonomi biru ASEAN dapat dikategorikan dalam beberapa model:

Bilateral cooperation: Kerja sama bilateral antar negara ASEAN dalam isu-isu spesifik seperti pengelolaan perikanan lintas batas (Indonesia-Malaysia-Filipina dalam Coral Triangle Initiative), pertukaran teknologi akuakultur (Vietnam-Thailand), dan pengembangan pariwisata bahari regional (Indonesia-Thailand-Malaysia dalam golden triangle tourism) (Coral Triangle Initiative, 2023).

Sub-regional cooperation: Kerja sama sub-regional yang melibatkan sekelompok negara dengan kepentingan geografis atau sektoral serupa, seperti *Gulf of Thailand Cooperation* (Thailand, Vietnam, Kamboja), *Sulu-Sulawesi Seascape* (Indonesia, Malaysia, Filipina), dan *Mekong Blue Economy Initiative* (Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, Myanmar) (Mekong River Commission, 2024).

ASEAN wide initiatives: Program dan proyek yang melibatkan seluruh atau mayoritas negara anggota ASEAN, seperti *ASEAN Blue Innovation Challenge*, *Blue Carbon and Finance Profiling Project*, dan *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices* (ASEAN, 2024).

External partnerships: Kerja sama dengan mitra eksternal seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, Uni Eropa, dan organisasi internasional (UNDP, World Bank, ADB, FAO) dalam pendanaan, transfer teknologi, dan *capacity building* (UNDP Indonesia, 2024).

Proyek dan Inisiatif Konkret

Sejak adopsi *framework* pada September 2023, berbagai proyek dan inisiatif konkret telah diluncurkan di tingkat regional:

ASEAN Blue Innovation Challenge (2024-2025): Kompetisi regional untuk mengidentifikasi dan mendukung solusi inovatif dalam ekonomi biru. Fase pertama berhasil mengidentifikasi 50 inovator dari berbagai negara ASEAN di bidang *sustainable aquaculture, marine biotechnology, waste management, dan renewable energy*(UNDP Indonesia, 2025).

Blue SEA Finance Hub: Platform pembiayaan yang secara resmi diluncurkan di Jakarta pada Mei 2024, telah memfasilitasi lebih dari USD 150 juta pendanaan untuk 23 proyek ekonomi biru di kawasan ASEAN, mencakup restorasi mangrove, pengembangan *mariculture* berkelanjutan, dan pembangunan *mini-grid* berbasis energi laut(Green Network Indonesia, 2025).

ASEAN Blue Carbon Framework: Kerangka metodologi bersama untuk pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) karbon biru yang dikembangkan melalui *Blue Carbon and Finance Profiling Project*. Framework ini bertujuan untuk memfasilitasi akses negara-negara ASEAN ke pasar karbon internasional dan mekanisme Article 6 Paris Agreement(UNDP Indonesia, 2025; UNDP Indonesia, 2025).

Marine Debris Action Framework: Rencana aksi regional untuk mengurangi sampah plastik dan polusi laut di ASEAN, yang mengintegrasikan pendekatan *circular economy* dan melibatkan sektor swasta dalam solusi(ASEAN, 2024).

ASEAN Network of Blue Economy Research Centers: Jaringan institusi riset kelautan dari berbagai negara ASEAN untuk kolaborasi riset, pertukaran data, dan pengembangan kapasitas SDM. Indonesia diwakili oleh BRIN, IPB University, dan beberapa universitas maritim(ERIA, 2024).

Peran Mitra Pembangunan

Implementasi ekonomi biru ASEAN mendapat dukungan signifikan dari berbagai mitra pembangunan internasional:

UNDP: Melalui program *ASEAN Blue Economy Initiative*, UNDP memberikan dukungan teknis dan finansial untuk pengembangan *framework, Blue Innovation Challenge, dan Blue Carbon Profiling*. Total komitmen pendanaan UNDP untuk ekonomi biru ASEAN mencapai USD 25 juta untuk periode 2023-2027(UNDP Indonesia, 2024; UNDP Indonesia, 2024).

Pemerintah Jepang: Sebagai mitra strategis, Jepang menyediakan pendanaan untuk *Blue Carbon and Finance Profiling Project* dan mendukung transfer teknologi dalam pengembangan *offshore wind energy* dan *sustainable aquaculture*(MOFA Japan, 2024).

ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia): Menyediakan riset dan analisis kebijakan yang menjadi dasar pengembangan *framework*, termasuk studi komprehensif tentang tantangan dan peluang ekonomi biru di Asia Tenggara(ERIA, 2023).

World Bank dan ADB: Menyediakan pembiayaan berskala besar untuk proyek-proyek infrastruktur ekonomi biru, seperti pembangunan pelabuhan hijau, pengembangan sistem monitoring perikanan, dan program restorasi ekosistem pesisir(World Bank, 2024).

European Union: Mendukung pengembangan *sustainable fisheries management, marine protected areas, dan capacity building* dalam *blue biotechnology* melalui program *EU- ASEAN Blue Growth*(European Union, 2024).

Tantangan dalam Koordinasi Regional

Meskipun terdapat kemajuan signifikan, koordinasi regional dalam implementasi ekonomi biru ASEAN menghadapi beberapa tantangan:

Kesenjangan kapasitas: Perbedaan yang sangat besar dalam kapasitas institusional, teknologi, dan sumber daya manusia antar negara anggota menyebabkan ketimpangan dalam kemampuan implementasi. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand memiliki kapasitas yang jauh lebih maju dibandingkan Laos, Myanmar, atau Kamboja (ERIA, 2023).

Konflik kepentingan: Terdapat potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya perikanan lintas batas, delimitasi batas maritim, dan akses terhadap *fishing grounds* yang sama. Isu Laut China Selatan juga membayangi kerja sama maritim di kawasan (Buszynski, 2012).

Fragmentasi kebijakan: Kebijakan ekonomi biru di beberapa negara masih tersebar di berbagai kementerian dan lembaga tanpa koordinasi yang efektif, menyulitkan *alignment* dengan *framework* regional (Transparency International Indonesia, 2023).

Keterbatasan pendanaan: Meskipun potensi ekonomi biru sangat besar, pendanaan untuk implementasi masih sangat terbatas. Estimasi kebutuhan investasi untuk ekonomi biru ASEAN mencapai USD 200 miliar hingga 2030, sementara pendanaan yang tersedia masih jauh di bawah angka tersebut (World Bank, 2023).

Data dan informasi: Keterbatasan data yang komprehensif, terintegrasi, dan terstandarisasi tentang kondisi ekosistem laut dan aktivitas ekonomi kelautan menyulitkan perencanaan dan monitoring di tingkat regional (ERIA, 2024).

IV. Tantangan dan Peluang

Implementasi *blue economy* di Indonesia dan ASEAN menghadapi berbagai tantangan struktural yang memerlukan pendekatan sistemik. Salah satu tantangan utama adalah *overfishing* dan degradasi ekosistem, di mana sebagian besar stok ikan di perairan ASEAN sudah berada dalam kondisi *fully exploited* atau bahkan *overexploited*. FAO mencatat bahwa 65 persen stok ikan di Asia Tenggara berada dalam tekanan berlebihan (FAO, 2022). Selain itu, degradasi ekosistem pesisir, terutama mangrove dan terumbu karang, semakin mengancam keberlanjutan jangka panjang ekonomi biru. Tantangan lain yang tidak kalah serius adalah praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* yang menimbulkan kerugian ekonomi diperkirakan mencapai USD 5-10 miliar per tahun. Lemahnya sistem *monitoring, control, and surveillance (MCS)* serta penegakan hukum di laut menjadi hambatan utama dalam mengatasi persoalan ini (UNODC, 2023).

Perubahan iklim juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi kelautan di kawasan ASEAN. Kenaikan suhu laut, *acidification*, kenaikan permukaan air laut, dan perubahan pola arus laut mengancam produktivitas perikanan serta keberlanjutan ekosistem pesisir. ASEAN termasuk salah satu wilayah yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim (IPCC, 2022). Di sisi lain, polusi dan sampah plastik menjadi masalah besar karena ASEAN menyumbang sekitar 60 persen dari sampah plastik laut global. Polusi ini tidak hanya mengancam ekosistem laut, tetapi juga mengganggu aktivitas perikanan dan pariwisata serta menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat pesisir (Jambeck et al., 2015).

Selain tantangan ekologis, terdapat pula masalah sosial-ekonomi yang signifikan.

Mayoritas nelayan kecil dan masyarakat pesisir di ASEAN masih hidup dalam kemiskinan atau *near-poverty*, dengan akses yang terbatas terhadap modal, teknologi, pasar, dan jaminan sosial. Tanpa inklusi sosial yang nyata, ekonomi biru berisiko hanya menguntungkan korporasi besar dan memperburuk ketimpangan (WorldFish, 2023). Konflik tenurial dan hak akses juga menjadi isu penting, karena banyak masyarakat pesisir, termasuk masyarakat adat, tidak memiliki kepastian hukum atas wilayah laut tradisional mereka. Ekspansi sektor ekonomi biru tanpa pengakuan hak-hak masyarakat lokal berpotensi menimbulkan konflik dan marginalisasi (Rights and Resources Initiative, 2023).

Namun, di tengah berbagai tantangan tersebut, terdapat peluang strategi yang dapat dimanfaatkan untuk mengakselerasi ekonomi biru berkelanjutan. Potensi ekonomi kelautan ASEAN sangat besar, dengan total nilai diperkirakan mencapai USD 500 miliar per tahun

dan berpotensi tumbuh menjadi USD 1 triliun pada 2030 jika dikelola secara berkelanjutan. Sektor-sektor seperti *sustainable aquaculture*, *marine biotechnology*, dan *renewable ocean energy* memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi (OECD, 2023). Momentum politik global juga mendukung pengembangan ekonomi biru, tercermin dalam *UN Ocean Conference*, *High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy*, serta berbagai komitmen internasional yang membuka peluang mobilisasi pendanaan dan kerja sama global (High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy, 2020).

Selain itu, inovasi teknologi menjadi faktor pendorong penting. Perkembangan pesat dalam teknologi digital seperti *Internet of Things*, AI, dan *satellite monitoring*, serta bioteknologi kelautan dan energi terbarukan laut, membuka peluang *leapfrogging* bagi

negara-negara berkembang di ASEAN (World Economic Forum, 2024). Pasar karbon biru (*blue carbon market*) juga menawarkan peluang besar, mengingat Indonesia dan ASEAN memiliki luas mangrove terbesar di dunia. Harga karbon yang meningkat di *voluntary carbon market (VCM)* serta mekanisme *Article 6 Paris Agreement* membuka akses pendanaan baru untuk konservasi dan restorasi ekosistem pesisir (Gold Standard, 2024).

Faktor demografi turut memperkuat peluang ini, karena ASEAN memiliki populasi muda yang besar dengan median usia 30 tahun. Generasi muda dapat menjadi motor inovasi dan *entrepreneurship* dalam ekonomi biru, terutama jika didukung oleh pendidikan dan pelatihan vokasional maritim (ASEAN, 2023). Lebih jauh, regionalisme dan integrasi ekonomi melalui *ASEAN Economic Community* dan berbagai skema integrasi regional membuka peluang *economies of scale*, *value chain integration*, serta akses pasar regional yang lebih luas bagi produk-produk ekonomi biru (ASEAN, 2025).

Pembelajaran dari praktik terbaik (*best practices*) negara lain juga dapat menjadi referensi bagi ASEAN. Norwegia, misalnya, menerapkan pendekatan *integrated ocean management* yang mengintegrasikan semua sektor kelautan dalam satu kerangka *marine spatial planning*, sehingga tercapai keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan konservasi (Norwegian Ministry of Trade, Industry and Fisheries, 2020). Seychelles menjadi pelopor dengan menerbitkan *sovereign blue bonds* untuk membiayai proyek-proyek ekonomi biru berkelanjutan, sebuah mekanisme yang dapat diadopsi oleh negara-negara ASEAN (World Bank, 2018). Portugal mengembangkan *blue economy clusters* yang mengintegrasikan riset, industri, dan pendidikan dalam satu ekosistem inovasi, model yang relevan untuk hub maritim ASEAN seperti Singapura, Surabaya, atau Batam (Portuguese Ministry of the Sea, 2021). Sementara itu, New Zealand berhasil menerapkan sistem *community-based fisheries management* yang memberikan hak akses jelas kepada komunitas lokal dan memastikan keberlanjutan stok ikan, sejalan dengan prinsip inklusi sosial dalam ekonomi biru ASEAN (New Zealand Ministry for Primary Industries, 2022).

V. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis terhadap kebijakan ekonomi biru Indonesia dalam kerangka kerja ASEAN, berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan untuk memperkuat implementasi:

Rekomendasi untuk Tingkat Nasional (Indonesia)

1. Memperkuat koordinasi antar kementerian/lembaga: Membentuk *National Blue Economy Council* di level kepresidenan untuk memastikan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan ekonomi biru lintas sektor
2. Meningkatkan alokasi anggaran: Meningkatkan alokasi APBN untuk sektor kelautan dari 1,2 persen (2024) menjadi minimal 3 persen pada 2030, sejalan dengan kontribusi target sektor ini terhadap PDB
3. Mempercepat implementasi *Marine Spatial Planning* (MSP): Menyelesaikan penyusunan MSP untuk seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia pada 2027 untuk memastikan pemanfaatan ruang laut yang optimal dan berkelanjutan
4. Memperkuat sistem MCS dan penegakan hukum: Meningkatkan investasi dalam teknologi monitoring (*satellite-based VMS, AIS*), menambah jumlah kapal patroli, dan memperkuat sanksi hukum terhadap IUU *fishing*
5. Mengembangkan skema pembiayaan inovatif: Menerbitkan *sovereign blue bonds*, mengembangkan *blended finance mechanisms*, dan memperluas akses UMKM maritim terhadap pembiayaan perbankan dan non-bank
6. Memprioritaskan inklusi sosial: Memastikan partisipasi aktif nelayan kecil, masyarakat pesisir, dan masyarakat adat dalam perencanaan dan implementasi proyek ekonomi biru, termasuk skema *benefit-sharing* yang adil
7. Mempercepat pengembangan *blue carbon*: Menyelesaikan regulasi nasional tentang *blue carbon trading*, mengembangkan metodologi MRV yang kredibel, dan memfasilitasi akses masyarakat pesisir ke pasar karbon
8. Mengembangkan SDM ekonomi biru: Memperluas program pendidikan dan pelatihan vokasi maritim, mendukung riset dan inovasi dalam ekonomi biru, dan membangun *ocean literacy* di seluruh tingkatan pendidikan

Rekomendasi untuk Tingkat Regional (ASEAN)

1. Memperkuat ASEAN *Task Force on Blue Economy*: Memberikan mandat yang lebih kuat, menyediakan *secretariat support* yang memadai, dan melembagakan mekanisme monitoring & evaluation yang transparan
2. Mengembangkan ASEAN *Blue Economy Regional Database*: Membangun platform data regional yang terintegrasi untuk mendukung *evidence-based policymaking* dan memfasilitasi *knowledge sharing*
3. Harmonisasi regulasi dan standar: Mengembangkan ASEAN *widest standards* untuk *sustainable fisheries*, *eco-labeling*, *environmental impact assessment*, dan *certification schemes* dalam ekonomi biru
4. Memperkuat mekanisme pendanaan regional: Mengembangkan ASEAN *Blue Economy Fund* yang dapat diakses oleh semua negara anggota, terutama negara-negara dengan kapasitas terbatas
5. Mengembangkan *capacity building programs*: Melembagakan program pelatihan regional, *fellowship programs*, dan *technical assistance* untuk

mengurangi kesenjangan kapasitas antar negara

6. Memperkuat kerjasama dalam penanganan IUU fishing: Mengembangkan regional MCS network, harmonisasi sistem traceability, dan mutual legal assistance dalam penegakan hukum maritim
7. Membangun regional blue carbon market: Mengembangkan mekanisme regional untuk trading blue carbon credits antar negara ASEAN dan memfasilitasi akses bersama ke pasar karbon internasional
8. Mengintegrasikan ekonomi biru dalam ASEAN Economic Community: Memastikan bahwa ekonomi biru menjadi bagian integral dari ASEAN Economic Community Blueprint dan mendapat prioritas dalam integrasi ekonomi regional

Rekomendasi untuk Kerja Sama dengan Mitra Eksternal

1. Meningkatkan South-South Cooperation: Memperkuat kerja sama dengan negara-negara berkembang lain yang memiliki pengalaman sukses dalam ekonomi biru, seperti Seychelles, Mauritius, dan negara-negara Pacific Island
2. Mobilisasi climate finance: Memanfaatkan berbagai mekanisme climate finance internasional (GCF, GEF, Adaptation Fund) untuk mendanai proyek-proyek ekonomi biru yang berkontribusi pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
3. Memperkuat multi stakeholder partnership: Mengembangkan partnership yang lebih strategis dengan sektor swasta, filantropi, dan civil society organizations dalam implementasi ekonomi biru
4. Transfer teknologi dan inovasi: Memfasilitasi transfer teknologi dari negara-negara maju dalam bidang renewable ocean energy, marine biotechnology, dan sustainable aquaculture melalui mekanisme yang fair dan reciprocal

KESIMPULAN

Ekonomi biru telah menjadi agenda strategis bagi Indonesia dan ASEAN dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh terhadap perubahan iklim. Adopsi ASEAN Blue Economy Framework pada September 2023 menandai momentum penting dalam kerja sama kelautan regional, dengan Indonesia memainkan peran kunci sebagai motor penggerak melalui peluncuran Indonesia Blue Economy Roadmap 2023-2045. Analisis terhadap kebijakan ekonomi biru Indonesia menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan kerangka ASEAN dalam hal prinsip, pendekatan, dan prioritas sektoral. Indonesia tidak hanya mengadopsi framework regional, tetapi juga berkontribusi aktif dalam pengembangan dan implementasinya melalui berbagai inisiatif seperti Blue SEA Finance Hub, Blue Carbon and Finance Profiling Project, dan ASEAN Blue Economy Forum.

Dinamika kerja sama kawasan ASEAN dalam ekonomi biru menunjukkan tren positif dengan berbagai proyek dan inisiatif konkret yang telah diluncurkan. Namun, implementasi masih menghadapi tantangan struktural yang signifikan, termasuk kesenjangan kapasitas antar negara, keterbatasan pendanaan, fragmentasi kebijakan, dan isu-isu lingkungan seperti overfishing, IUU fishing, dan degradasi ekosistem laut. Di tengah tantangan tersebut, terdapat peluang strategis yang dapat dimanfaatkan, meliputi potensi ekonomi yang sangat besar, momentum politik global, inovasi teknologi, blue carbon market, dan demografi muda yang dapat menjadi motor entrepreneurship maritim. Keberhasilan ekonomi biru ASEAN akan sangat bergantung pada kemampuan negara-negara anggota untuk mengatasi tantangan struktural, memanfaatkan peluang strategis, dan memperkuat koordinasi regional.

Untuk mewujudkan visi ekonomi biru yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan, diperlukan komitmen politik yang kuat, alokasi sumberdaya yang memadai, dan partisipasi aktif dari semua stakeholder, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan terutama masyarakat pesisir yang menjadi pelaku utama ekonomi kelautan. Ekonomi biru bukan sekadar tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi tentang bagaimana memastikan bahwa laut yang sehat dapat terus memberikan manfaat bagi generasi saat ini dan yang akan datang. Indonesia, dengan posisinya sebagai negara maritim terbesar di ASEAN dan pemimpin alampengembangan ekonomi biru regional, memiliki tanggung jawab dan peluang besar untuk terus memimpin transformasi menuju ekonomi kelautan yang berkelanjutan dan berkeadilan di kawasan Asia Tenggara.

REFERENSI

- Arise Plus Indonesia. (2023, August 20). *Navigating prosperity: Indonesia's blue economy roadmap sails towards sustainable growth*.
- Bappenas. (2023). *Indonesia Blue Economy Roadmap*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas. [https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/\[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws\]](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws])
- ERIA. (2023). *Blue economy initiatives in South-East Asia: Challenges and opportunities*. Jakarta: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia. [https://www.eria.org/uploads/Blue-Economy-Initiatives-in-South-East-Asia.pdf\[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws\]](https://www.eria.org/uploads/Blue-Economy-Initiatives-in-South-East-Asia.pdf[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws])
- Transparency International Indonesia. (2023). *Melampaui jargon kebijakan "ekonomi biru"*. Jakarta: Transparency International Indonesia. [https://ti.or.id/wp-content/uploads/2023/12/Briefing-Paper-Blue-Economy-ASEAN.pdf\[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws\]](https://ti.or.id/wp-content/uploads/2023/12/Briefing-Paper-Blue-Economy-ASEAN.pdf[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws])
- ASEAN. (2023). *ASEAN Blue Economy Framework*. Jakarta: ASEAN Secretariat. [https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2023/09/2023-ASEAN-Blue-Economy-Framework.pdf\[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws\]](https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2023/09/2023-ASEAN-Blue-Economy-Framework.pdf[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws])
- Strategi ekonomi biru Indonesia di tengah dampak perubahan iklim. (2024, September 6). *Mongabay Indonesia*. [https://mongabay.co.id/2024/09/06/strategi-ekonomi-biru-indonesia-ditengah-dampak-perubahan-iklim/\[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws\]](https://mongabay.co.id/2024/09/06/strategi-ekonomi-biru-indonesia-ditengah-dampak-perubahan-iklim/[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws])
- World Bank. (2017). *What is the blue economy?* Washington, DC: World Bank Group. [ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]
- Centre for International Law. (2023, September 11). *2023 ASEAN Blue Economy Framework*. [https://cil.nus.edu.sg/databasecil/2023-asean-blue-economy-framework/\[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws\]](https://cil.nus.edu.sg/databasecil/2023-asean-blue-economy-framework/[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws])
- Atlantis Press. (2024). *A review on ASEAN Blue Economy Framework. International Conference Proceedings*. [https://www.atlantis-press.com/article/126014605.pdf\[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws\]](https://www.atlantis-press.com/article/126014605.pdf[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws])
- Thailand Ministry of Foreign Affairs. (2023, September 13). *ASEAN Blue Economy Framework*. Bangkok: Department of ASEAN Affairs. [https://asean.mfa.go.th/en/content/asean-blue-economy-framework-2\[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws\]](https://asean.mfa.go.th/en/content/asean-blue-economy-framework-2[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws])
- Ekonomi biru Indonesia: Potensi besar, ancaman lingkungan mengintai. (2025, February 26). *Hukum Online*. [https://www.hukumonline.com/berita/a/ekonomi-biru-indonesia--potensi-besar--ancaman-lingkungan-mengintai-lt67c0674d37cee/\[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws\]](https://www.hukumonline.com/berita/a/ekonomi-biru-indonesia--potensi-besar--ancaman-lingkungan-mengintai-lt67c0674d37cee/[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws])
- Bappenas: Ekonomi biru jadi mesin baru pertumbuhan ekonomi RI. (2024, May 18). *Antara News*. [https://www.antaranews.com/berita/4111341/bappenas-ekonomi-biru-jadi-mesin-baru-pertumbuhan-ekonomi-ri\[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws\]](https://www.antaranews.com/berita/4111341/bappenas-ekonomi-biru-jadi-mesin-baru-pertumbuhan-ekonomi-ri[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws])
- Bappenas. (2024). *Indonesia Blue Economy Roadmap* (2nd ed.). Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas. [ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]
- Indonesian blue economy roadmap launched at ASEAN Blue Economy Forum. (2023, July 2). *Arise Plus Indonesia*. [https://ariseplus-indonesia.org/en/activities/indonesian-blue-economy-roadmap-launched-at-asean-blue-economy-forum-with-arise-plus-support\[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws\]](https://ariseplus-indonesia.org/en/activities/indonesian-blue-economy-roadmap-launched-at-asean-blue-economy-forum-with-arise-plus-support[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws])

- HLFMSP2024:Indonesiadorongekonomibirusebagaisumberpertumbuhanekonomiinklusif.(2024, September 3). *Bappenas*. [https://www.bappenas.go.id/\[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws\]](https://www.bappenas.go.id/[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws])
- Pauli, G. (2010). *The blue economy: 10 years, 100 innovations, 100 million jobs*. Paradigm Publications.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]
- European Commission. (2021). *The EU blue economy report 2021*. Brussels: European Commission.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]
- ERIA.(2023).Chapter1:Theblue economy inSouth-East Asia. In *Blue EconomyInitiatives in South-East Asia*. [https://www.eria.org/uploads/media/Research-Project-Report/\[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws\]](https://www.eria.org/uploads/media/Research-Project-Report/[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws])
- ASEAN. (2015). *ASEAN Economic Community Blueprint 2025*. Jakarta: ASEAN Secretariat.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]
- UNDP Indonesia. (2024). *ASEAN Blue Economy initiatives*. [https://www.undp.org/indonesia/projects/asean-blue-economy-initiatives\[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws\]](https://www.undp.org/indonesia/projects/asean-blue-economy-initiatives[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws])
- ASEAN. (2023). *ASEAN Blue Economy Framework: Executive summary*. Jakarta: ASEAN Secretariat.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]
- Acharya, A. (2014). *Constructing a security community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order* (3rd ed.). Routledge.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]
- Hurrell, A. (1995). Regionalism in theoretical perspective. In L. Fawcett & A. Hurrell (Eds.), *Regionalism in world politics* (pp. 37–73). Oxford University Press.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]
- Bowen,G.A.(2009).Documentanalysisasaqualitative researchmethod.*QualitativeResearch Journal*,9(2),27–40.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]
- Bappenas. (2023). *Indonesia Blue Economy Roadmap 2023–2045: Policy paper*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas. [https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/\[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws\]](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws])
- FKP Indonesia, & Bappenas. (2025, September 9). *Peta jalan ekonomi biru Indonesia*. Forum Kajian Pembangunan. [https://www.fkpindonesia.org/summary-report/ekonomi-biru\[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws\]](https://www.fkpindonesia.org/summary-report/ekonomi-biru[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws])
- Bappenas. (2023). *Indonesia Blue Economy Roadmap: Executive summary*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]
- Bappenas. (2024). *Indonesia Blue Economy Roadmap* (2nd ed.). Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas. [https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/dokumenbappenas/\[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws\]](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/dokumenbappenas/[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws])
- IndonesiadukunglangkahkonkretimplementasikerangkaekonomibirudiASEAN.(2025,October23). *KementerianKoordinatorBidangPerekonomian*.[https://ekon.go.id/publikasi/detail/5920/\[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws\]](https://ekon.go.id/publikasi/detail/5920/[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws])
- Bappenas. (2024). *Indonesia Blue Economy Index (IBEI): Methodology and baseline*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. (2024). *Peraturan tentang Tim KoordinasiEkonomiBiruNasional*.Jakarta:KemenkoMarves.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]
- Mendorong ekonomi biru berkelanjutan dengan Blue SEA Finance Hub. (2025, September 10). *Green Network Indonesia*. [https://greennetwork.id/gna-knowledge-hub/mendorong-ekonomi-biru-berkelanjutan-dengan-blue-sea-finance-hub/\[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws\]](https://greennetwork.id/gna-knowledge-hub/mendorong-ekonomi-biru-berkelanjutan-dengan-blue-sea-finance-hub/[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws])
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Regulatory sandbox untuk ekonomi biru*. Jakarta: OJK.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]
- Bappenas. (2023). *Alignment of Indonesia Blue Economy Roadmap with ASEAN Blue Economy Framework* [Internal policy brief]. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2024). *Strategi pemberdayaan masyarakat pesisir dalam*

ekonomi biru. Jakarta: KKP.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

ASEAN. (2023). *Chairman's statement of the 43rd ASEAN Summit*. Jakarta: ASEAN Secretariat.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

ERIA.(2023).*Blue economy initiatives in South-East Asia: Challenges and opportunities*.<https://www.eria.org/research/blue-economy-initiatives-in-south-east-asia-challenges-and-opportunities>[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

ERIA. (2023, July 3). *ASEAN Blue Economy Forum 2023: Harnessing blue potential for sustainable development*. <https://www.eria.org/news-and-views/asean-blue-economy-forum-2023-harnessing-blue-potential-for-sustainable-development>[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

Centre for International Law.(2023).*2023 ASEAN Blue Economy Framework*.Singapore:NUS.
<https://cil.nus.edu.sg/database/cil/2023-asean-blue-economy-framework/>[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

Kementerian Luar Negeri RI.(2023).*Indonesia's role in ASEAN Blue Economy Framework development*. Jakarta: Kemlu RI.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

ASEAN. (2023). *ASEAN Blue Economy Framework: Full text*.
<https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2023/09/2023-ASEAN-Blue-Economy-Framework.pdf>[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

Atlantis Press.(2024).*A review on ASEAN Blue Economy Framework*.<https://www.atlantispress.com/article/126014605.pdf>[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

ASEAN.(2023).*ASEAN Blue Economy Framework implementation guidelines*. Jakarta: ASEAN Secretariat.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

Thailand Ministry of Foreign Affairs. (2023). *ASEAN Blue Economy Framework*. <https://asean.mfa.go.th/en/content/asean-blue-economy-framework-2>[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

ASEAN.(2024).*Terms of reference: ASEAN Task Force on Blue Economy*. Jakarta: ASEAN Secretariat.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

Bappenas.(2024).*HLFMSP2024: Indonesia dorong ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif*. <https://www.bappenas.go.id/>[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

UNDP Indonesia. (2025, February 18). *ASEAN Blue Innovation Challenge*. <https://www.undp.org/indonesia/asean-blue-innovation-challenge>[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

UNDP Indonesia. (2025, February 18). *ASEAN, Jepang, dan UNDP gelar Blue Innovation Expo*. <https://www.undp.org/id/indonesia/press-releases/>[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

UNDP Indonesia. (2025, May 21). *ASEAN, Jepang, dan UNDP luncurkan Blue Carbon and Finance Profiling Project*. <https://www.undp.org/id/indonesia/press-releases/>[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]

UNDP Indonesia.(2025,November26).*ASEAN experts convene in Jakarta to shape region's first blue carbon finance profiles*. <https://www.undp.org/indonesia/press-releases/>[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]